

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Selandia Baru merupakan negara pemegang kekuatan regional di Pasifik. Menempati kekuatan regional ini juga tentunya menempatkan Selandia Baru memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan negara-negara di Pasifik Selatan untuk mencapai kepentingan nasional, sekaligus berupaya untuk turut mengembangkan stabilitas dan kemakmuran Pasifik Selatan dengan cara memberikan investasi dan bantuan guna mendukung pembangunan berkelanjutan di Pasifik Selatan (Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru, 2015). Selain dengan negara-negara di Pasifik Selatan, Selandia Baru juga menjalin hubungan yang harmonis dengan lima negara atau kawasan lain yang memiliki hubungan diplomatik penting, yakni Australia, Amerika Serikat, Jepang, serta Uni Eropa. Dengan posisi Selandia Baru memiliki hubungan harmonis dengan negara-negara tersebut menempatkan Selandia Baru berada di titik yang nyaman dan damai dengan perekonomian yang stabil.

Seiring berkembangnya waktu, perekonomian negara Selandia Baru kini juga terikat erat dengan Tiongkok. Pada tahun 2004, Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru merilis pembaruan tentang hubungan diplomatik terpenting Selandia Baru dengan ditetapkannya enam negara atau wilayah, dengan ditambahkannya Tiongkok dalam jejeran mitra penting. Kehadiran Tiongkok yang semakin penting secara internasional maupun kekuatan pasar menunjukkan bahwa Selandia Baru berusaha mempertahankan hubungan yang saling memberikan dampak positif dengan Tiongkok (Brady, 2019). Tiongkok merupakan negara dengan perekonomian maju yang tengah berpotensi menjadi kekuatan ekonomi dunia. Atas dasar tersebut, maka hubungan Selandia Baru dan Tiongkok didominasi oleh perdagangan guna memenuhi kepentingan masing-masing negara. Antara 2009 hingga 2014, perdagangan antara Selandia Baru dan Tiongkok meningkat dua kali lipat menjadi \$20 miliar, ekspor tumbuh pada tingkat tahunan setinggi 50% (Brady, 2019).

Hubungan perdagangan yang dilakukan antara Tiongkok dan Selandia Baru terus mengalami peningkatan, di mana keduanya menyetujui untuk membangun hubungan menjadi kemitraan strategis yang komprehensif pada tahun 2014. Xi Jinping, Presiden Tiongkok mengatakan bahwa Tiongkok dan Selandia Baru harus menjaga pertukaran tingkat tinggi dan membangun pola komunikasi serta kerja sama multi-level (Kementerian Luar Negeri Tiongkok, 2014). Saat meningkatkan hubungan menjadi kemitraan strategis yang komprehensif, Tiongkok juga menyebutkan bahwa Tiongkok siap untuk memperkuat kerja sama dengan Selandia Baru guna untuk membantu urusan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan (Kementerian Luar Negeri Tiongkok, 2014). Meski perdagangan internasional antara Selandia Baru dan Tiongkok terus berjalan, namun hubungan antara Tiongkok dan Selandia Baru tidak selalu berjalan mulus. Dalam perjalanannya, munculnya berbagai tantangan sehingga menghambat kerja sama yang tengah dilakukan. Tantangan yang hadir adalah karena adanya perbedaan latar belakang antar keduanya membuat nilai dan kepentingan bertentangan antar satu dengan yang lain. Ini kemudian berdampak pada saat Tiongkok melakukan pergerakan yang dianggap berlebihan di Pasifik Selatan sehingga bertentangan dengan nilai dan kepentingan Selandia Baru (Baker, 2020)

Dari tahun ke tahun, Selandia Baru menempati kedudukan kedua setelah Australia sebagai negara dominan di Pasifik. Namun, seiring berkembangnya waktu kehadiran Tiongkok di Pasifik turut meningkat secara drastis dan menjadi mitra penting bagi negara-negara di Pasifik Selatan, melalui investasi secara besar-besaran hubungan bilateral dengan negara-negara di Pasifik Selatan. Terhitung total hingga tahun 2015, Tiongkok mengeluarkan dana bantuan sebesar \$1,78 miliar dan mengimplementasikannya lebih dari 200 proyek tersebar di kawasan (Oosterveld et al, 2018). Bahkan, peningkatan bantuan secara drastis oleh Tiongkok ini menjadikannya sebagai negara pendonor paling besar ketiga di Pasifik pada tahun 2017. Tiongkok menggunakan *cheque diplomacy* dengan menawarkan dana bantuan yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi di Pasifik Selatan (Lyons, 2018). Tak hanya sebatas pemberian dana bantuan, Tiongkok juga memberikan dana tambahan untuk proyek infrastruktur, diikuti dengan perusahaan milik negara Tiongkok turut hadir di Pasifik Selatan. Aktivitas pembangunan Tiongkok di kawasan Pasifik Selatan mencapai

\$958 juta, hampir enam kali lebih besar dari aktivitas bantuan luar negerinya (Pryke, 2020).

Hubungan antara Tiongkok dan negara-negara di Pasifik Selatan yang kian erat telah mengakibatkan keterlibatan Selandia Baru sebagai negara kekuatan tradisional di kawasan kian menurun (Oosterveld et al, 2018). Pemberian dana bantuan dalam skala besar secara berkala menimbulkan ketidakstabilan, di mana menyebabkan Pasifik Selatan sangat rentan dan terus membutuhkan bantuan luar negeri. Atas hal tersebut, ini mendorong pengaruh regional Tiongkok di Pasifik terus tumbuh. Dengan pengaruh Tiongkok yang terus tumbuh, agar Selandia Baru sebagai kekuatan tradisional tidak kehilangan pengaruhnya maka perlunya dibuat keputusan terkait Selandia Baru mengkalibrasi kebijakan luar negerinya (Steff, 2018). Terlebih disaat Tiongkok merupakan relatif pendatang baru apabila disandingkan dengan Australia, Amerika Serikat dan Prancis yang telah memiliki sejarah panjang di Pasifik.

Seiring kehadiran Tiongkok di Pasifik yang kian meningkat, indikasi yang menunjukkan Selandia Baru merespon pada isu ini pada tahun 2017, adanya Jian Yang. Jian Yang merupakan akademisi di Selandia Baru dan menjadi anggota parlemen Partai Nasional yang terkena skandal. Dilaporkan bahwa sebelum menjadi anggota parlemen, Yang telah bekerja selama beberapa tahun untuk sekolah intelijen militer Tiongkok dan merupakan anggota dari Partai Komunis Tiongkok tetapi tidak menyebutkan fakta-fakta ini ketika melamar kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan di Selandia Baru (Jennings dan Reid, 2019 dalam Köllner, 2019). Pada masa pemerintahan John Key, Yang merupakan tokoh penting dalam hubungan antara Selandia Baru dengan Tiongkok. Peristiwa Yang menandai dimulainya debat publik di Selandia Baru tentang kemungkinan campur tangan Partai Komunis Tiongkok dalam politik domestik dan ruang publik. Skandal itu juga membuat pengamat kritis mempertanyakan apakah Selandia Baru dapat diandalkan sebagai anggota klub berbagi intelijen "Five Eyes", yang meliputi Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Australia (Köllner, 2019).

Di tahun yang sama, Wakil Perdana Menteri Selandia Baru Winston Peters juga mengajukan pertanyaan serupa terkait Jian Yang. Selain itu, Peters juga menanggapi terkait pengaruh Tiongkok dalam industri susu. Peters mengatakan,

“dalam lima tahun, Tiongkok telah mengambil alih industri susu formula bayi Selandia Baru dan mereka memiliki kunci pintu belakang untuk nilai tambah industri kami” ...“Di seluruh negeri, nasional dan politisi pemerintah daerah telah berbicara kepentingan Tiongkok di pendanaan infrastruktur. Tiongkok diam-diam mulai mendominasi kehidupan warga Selandia Baru dan jelas arah ekonomi kita,” ujar Peters (Cornall, 2017).

Baik terkait Jian Yang dan industri susu, keduanya diharapkan untuk perlu diselidiki lebih lanjut.

Meningkatnya hubungan antara Tiongkok dengan negara-negara di Pasifik Selatan ini juga bersamaan dengan Selandia Baru yang tengah melakukan pengaturan ulang terhadap kebijakan luar negeri nya di Pasifik Selatan yakni dengan mengeluarkan kebijakan Pacific Reset pada tahun 2018, di bawah pemerintahan Perdana Menteri Jacinda Ardern. Motivasi besar untuk dilakukannya pengaturan sebagaimana yang disampaikan oleh Wakil Perdana Menteri Winston Peters pada 28 Maret adalah fokus baru pada keamanan Pasifik dan kesejahteraan ekonomi, isu-isu terkait lingkungan dan masyarakat yang harus ditangani, serta peningkatan fokus pada Pasifik Selatan sebagai aset strategis utama di mata ‘pihak eksternal’ (TradeStaff Global, 2020). Tak hanya itu, kebijakan Pacific Reset ini juga menaruh fokus utamanya pada bantuan luar negeri di Pasifik Selatan. Pacific Reset Cabinet Paper mencatat bahwa hal ini bertujuan untuk mengatasi ‘serangkaian masalah yang memusingkan’ di kawasan dan lingkungan strategis yang semakin diperebutkan, yang keduanya mengikis pengaruh Selandia Baru dan menantang kemampuannya untuk mengejar kepentingannya di kawasan (Kantor Menteri Luar Negeri Selandia Baru, 2018 dalam Mark, 2020).

Powles dan Powles (2018, dalam Mark, 2020) mengatakan bahwa kebijakan Pacific Reset digambarkan sebagai perubahan kebijakan paling signifikan terhadap kawasan Pasifik Selatan dalam beberapa dekade. Ini dikarenakan kebijakan luar negeri Selandia Baru terhadap Pasifik Selatan sebelumnya lebih berfokus pada aspek pembangunan ekonomi selama tiga pemerintahan partai Nasional sebelumnya. Sebagaimana dalam pidato

Winston Peters, terdapat dua untaian yang berbeda terkait kebijakan luar negeri Selandia Baru yang dikalibrasi ulang terhadap Pasifik Selatan. Dilakukannya pengaturan ulang kebijakan Pasifik Selatan ini akan membutuhkan Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan kembali, terbuka untuk debat yang kuat dan terinformasi tentang kebijakan Pasifik mana yang efektif dan yang menuntut pemikiran ulang; pendalaman kumpulan pakar diplomatik Selandia Baru, dan pelatihan para diplomat tersebut dalam bahasa dan budaya Pasifik; serta penerapan prinsip-prinsip kemitraan, perlindungan, dan partisipasi *Te Teriti o Waitangi*¹ pada pendekatan kebijakan luar negeri di Pasifik untuk memastikan keterlibatan yang tulus dan berkelanjutan (Powles dan Powles, 2018).

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dilihat bahwa dengan kehadiran Tiongkok di Pasifik Selatan yang kian mendominasi, ini menjadikan Selandia Baru turut meningkatkan keeratan hubungannya dengan Pasifik Selatan. Meningkatnya perhatian yang diberikan oleh Selandia Baru terhadap Pasifik juga diikuti dengan dikeluarkannya kebijakan Pacific Reset pada tahun 2018, menunjukkan bahwa Selandia Baru memiliki alasan-alasan tertentu terkait kepentingan Selandia Baru dalam membuat kebijakan Pacific Reset. Maka dari itu, ini menjadi topik menarik dan masih minim dikaji, sehingga penulis hendak melakukan penelitian terkait topik ini.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana implikasi kebijakan Pacific Reset yang ditujukan untuk merespon kehadiran Tiongkok terhadap hubungan Selandia Baru dengan negara-negara kepulauan Pasifik Selatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, maka penelitian ini mencoba untuk menjabarkan apa saja implikasi kebijakan

¹ *Te Teriti o Waitangi* adalah kesepakatan antara banyak kepala suku Māori di Aotearoa Selandia Baru dan Kerajaan Inggris.

Pacific Reset yang ditujukan untuk merespon kehadiran Tiongkok terhadap hubungan Selandia Baru dengan Pasifik.

1.4. Kerangka Pemikiran

1.4.1. Teori *Offense-Defense*

Teori *Offense-Defense* adalah teori politik internasional yang cukup optimis, karena teori ini berpendapat bahwa ketika *defense* memiliki keunggulan dibandingkan *offense*, perang besar dapat dihindari (Glaser & Kauffman, 1998). Namun sebaliknya, Van Evera (1998) berargumen bahwa perang jauh lebih mungkin terjadi ketika penaklukan mudah, dan pergeseran akan terjadi ketika keseimbangan *offense-defense* memiliki efek besar pada risiko perang. Seiring berkembangnya waktu, situasi perang besar mungkin telah jarang ditemui, namun kehadiran ancaman eksternal pada suatu kawasan merupakan situasi yang tidak dapat dihindari. Langkah yang dilakukan untuk menjaga keamanan negara tidak hanya bergantung pada kebijakan yang agresif, cara efektif dalam menjamin kondisi keamanan dan survivalitas negara adalah dengan mengambil kebijakan yang cenderung moderat, tidak condong kearah keputusan agresif namun juga tidak selalu pasif (Dharmaputra, 2016). Jervis (1978) mengatakan bahwa negara harus menyeimbangkan antara strategis ofensif dan defensif. Strategis ofensif digunakan untuk meningkatkan kemampuan negara dalam menjaga pertahanannya dari adanya ancaman eksternal, serta strategi ofensif juga berkaitan untuk mencapai tujuan defensif dalam kaitannya dengan dilema keamanan yang terjadi di dalam struktur internasional.

Terdapat sepuluh penyebab perang menurut Van Evera (1998) ketika *offense* mendominasi di suatu kawasan. Pertama, disaat negara-negara lebih mudah ditaklukkan, maka ini akan mengundang ekspansi negara lain, sekalipun negara dengan kekuatan sedang. Kedua, ketika negara kesulitan dalam *self-defense*, ini akan menjadikan negara berada di posisi kurang aman. Ketiga, rasa ketidakamanan negara akan mendorong untuk menolak ekspansi negara lain dengan lebih keras. Meningkatnya kekuasaan oleh negara lain tersebut sekaligus

meningkatkan ancaman terhadap keamanan nasional. Keempat, keuntungan terhadap negara penyerang pertama, meningkatkan bahaya perang preventif. Kelima, peluang serta kerentanan lebih besar, akan meningkatkan bahaya perang preventif. Keenam, negara kerap mengadopsi taktik diplomasi *fait accompli*, taktik yang dapat memicu peperangan. Ketujuh, perundingan yang dilakukan oleh negara-negara tidak harmonis, menyebabkan negosiasi kerap gagal dan menimbulkan perselisihan semakin parah tanpa titik temu. Kedelapan, negara meningkatkan kerahasiaan menjadi lebih ketat terkait pertahanan dan kebijakan luar negerinya, menambah risiko salah perhitungan dan diplomatik blunder. Kesembilan, terjadinya kompetisi persenjataan lebih cepat dan lebih sulit dikendalikan, menambah risiko perang preventif dan perang *false optimism*. Terakhir, dominasi *offense* adalah *self-feeding*. Ketika penaklukan semakin mudah dilakukan, negara akan mengadopsi kebijakan yang membuat penaklukan lebih mudah (misalnya, kebijakan militer yang lebih ofensif). Dengan begitu, ini akan memperbesar efek pertama-kesembilan. Dalam teori ini berfokus dan diaplikasikan pada penelitian ini untuk menjelaskan terkait perilaku negara dalam mempertahankan posisi negaranya dari ancaman eksternal pada suatu kawasan.

1.4.2. Teori *Small States' Foreign Policy*

Berakhirnya Perang Dingin pada awal 1990-an menjadi pemicu perubahan dramatis dalam isu dan kebijakan luar negeri beberapa negara. Hal tersebut juga menggeser konsep kekuasaan yang semula beranggapan bahwa negara besar adalah negara yang kuat, menjadi kebijakan negara kecil yang kuat. Proses transisi ini membuat banyak negara-negara kecil telah mengadopsi kebijakan luar negeri yang efektif dengan menggunakan dimensi non-materi dengan cara yang bertentangan dengan teori realisme dalam hubungan internasional (Galal, 2020). Secara teori, kebijakan “negara kecil” (*small states*) dipengaruhi oleh kondisi internasional dan juga kondisi internal dari negara tersebut (Rogers, 2007). Secara garis besar, negara kecil bisa menjadi negara yang kuat walaupun dikelilingi oleh negara-negara besar, tergantung dari kebijakan internal negara tersebut yang kemudian menjadi fondasi kekuatan negara (Barnett & Duvall, 2005).

Menurut teori *small states' foreign policy*, negara mampu untuk bertahan hidup dalam himpitan negara besar, bahkan bersaing dengan negara besar apabila memiliki keunggulan di bidang sumber daya manusia, letak geografis yang dimanfaatkan secara maksimal, dan kemajuan teknologi (Galal, 2020). Knopf (1959) menyebutkan bahwa negara-negara kecil juga mampu untuk menjadi negara berpengaruh melalui beberapa cara; Pertama, negara-negara tersebut berusaha untuk memiliki kekuasaan lebih dengan mengadopsi kebijakan-kebijakan yang mendukung status quo. Kedua, negara-negara tersebut berusaha memperbaiki posisinya dalam hierarki internasional dengan meningkatkan ekspansi eksternal. Ketiga, negara-negara kecil tersebut puas dengan tingkat kekuatan mereka dan mereka tidak peduli untuk meningkatkan kekuatan mereka.

Kehadiran negara besar di suatu kawasan merupakan suatu fenomena yang sulit untuk dihindari, sekalipun oleh negara kecil dengan pengaruh tradisional pada kawasan tersebut. Untuk mempertahankan pengaruhnya, negara kecil tidak dapat melakukan melalui kekuatannya sendiri (Fox & Vital, 1972). Sebaliknya, negara kecil perlu untuk mengubah unsur-unsur kekuasaan menjadi alat pengaruh terhadap perilaku negara lain. Negara kecil dapat menjadi negara berpengaruh apabila mereka memiliki keunggulan di bidang non-kekuatan, karena keunggulan di bidang militer belum tentu dapat mempengaruhi kebijakan dari negara tetangga (Fox & Vital, 1972). Dalam berurusan dengan kekuatan besar, kekuatan kecil harus berhati-hati. Thorhallsson dan Steinsson (2017) mencatat bahwa negara kecil 'informalitas, fleksibilitas, dan otonomi diplomat mereka dapat terbukti menguntungkan dalam negosiasi dan dalam pengaturan kelembagaan'.

Seperti halnya dalam (Abo Lila, 2018), negara kecil dapat menjalankan politik luar negerinya dengan menciptakan ciri khas. Negara ini menyediakan layanan atau komoditas khusus untuk internal maupun eksternal untuk membuat publik tertarik pada layanan atau komoditas ini. Misalnya, negara kecil dapat memberikan layanan mediasi atau memberikan investasi dan bantuan asing di banyak sektor, yang membuat negara lain sadar akan pentingnya negara ini dan kualitas layanannya. Dengan demikian, dapat memperoleh keuntungan yang

cukup besar dalam politik internasional (Abo, Lila, 2017). Berkaitan dengan hal tersebut, para pengamat menilai keberhasilan negara dalam menciptakan ciri khasnya tidak mudah karena hal ini menuntut negara untuk mempertahankan ciri khas tersebut. Dalam teori ini berfokus dan diaplikasikan pada penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana negara kecil mengambil keputusan kebijakan luar negeri untuk mempertahankan posisi negaranya dan mampu bersaing dengan adanya kehadiran negara besar.

1.4.3. Konsep *Soft Power* dan *Public Diplomacy*

Power merupakan kemampuan yang digunakan oleh negara untuk mempengaruhi pikiran dan tindakan negara lain dengan tujuan mencapai kepentingannya. Kekuatan dapat diaplikasikan dengan berbagai cara; baik dalam bentuk ancaman paksaan, bujukan dan ‘pembayaran’, maupun ketertarikan yang membuat negara lain memiliki keinginan yang sama. Suatu negara dapat memperoleh hasil yang diinginkannya dalam politik dunia karena negara lain ingin mengikutinya, mengagumi nilai-nilainya, meniru teladannya, dan/atau mencita-citakan tingkat kemakmuran dan keterbukaannya (Nye, 2008).

Pengaplikasian kekuatan pada hubungan internasional sebelumnya lebih berfokus pada isu-isu *high politics*. Seiring berkembangnya waktu, cara untuk meraih kepentingan negara tidak hanya melalui ancaman paksaan dengan penggunaan senjata militer. Adalah *soft power*, kemampuan untuk memperoleh hasil yang diinginkan dengan daya tarik daripada ancaman paksaan. *Soft power* bukan hanya sekadar pengaruh, namun merupakan salah satu sumber pengaruh (Nye, 2008). Walaupun *soft power* secara umum juga berusaha menggerakkan negara lain, perbedaannya dengan *hard power* ialah ini juga merupakan kemampuan untuk memikat dan menarik. *Soft power* menurut Nye (2008) dapat diukur melalui dua hal, yakni pada segi perilaku, *soft power* adalah kekuatan yang menarik. Dari segi sumber daya, sumber daya *soft power* adalah aset yang menghasilkan daya tarik tersebut.

Adanya dua cara ukur *soft power* ini penting untuk memahami hubungan antara *soft power* dan diplomasi publik. Dalam dunia internasional, sumber daya yang menghasilkan *soft power* sebagian besar dari nilai-nilai yang diekspresikan oleh negara dalam budayanya, dalam contoh yang ditetapkan oleh praktik dan kebijakan internalnya, dan dalam cara negara tersebut menangani hubungannya dengan negara lain (Nye, 2008). Diplomasi publik dimaknai sebagai instrumen yang digunakan pemerintah negara untuk memobilisasi sumber daya ini untuk berkomunikasi dengan dan menarik publik negara lain, bukan hanya pemerintah mereka.

Wong (2006) mendeskripsikan diplomasi publik sebagai sebuah aktivitas interaksi yang terjalin antar pemerintah negara dengan publik mancanegara yang bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait kenegaraan, sikap, institusi, budaya, kepentingan nasional, serta kebijakan-kebijakan yang telah diambil ataupun dibentuk oleh negara tersebut. Sedangkan Tuch (1990) mendefinisikan diplomasi publik mengacu pada "proses komunikasi pemerintah dengan publik asing dalam upaya untuk mewujudkan pemahaman tentang ide dan cita-cita bangsanya, institusi dan budayanya, serta tujuan nasional dan kebijakan saat ini". Sehingga, dapat disimpulkan bahwa diplomasi publik merupakan sarana negara untuk berkomunikasi dengan publik di negara lain yang bertujuan untuk menginformasikan dan mempengaruhi dengan tujuan mempromosikan kepentingan nasional dan memajukan tujuan kebijakan luar negerinya. Dengan diplomasi publik, selain menjaga hubungan aliansi jangka panjang juga melemahkan propaganda musuh (Britannica, 2017).

Sejak awal kemunculannya, diplomasi publik dianggap sebagai bagian dan instrumen dari kebijakan luar negeri, berkaitan dengan prioritas pemerintah. Hingga kini, esensi dari diplomasi publik tersebut tidak berubah. Tetapi tujuan, instrumen dan pemainnya telah diperluas. Leonard (2002) mengatakan diplomasi publik juga membutuhkan penekanan yang lebih kuat pada pembangunan hubungan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Wong (2006), "komunikasi pada akhirnya memainkan peran penting dalam membentuk dan terkadang bahkan

mengubah persepsi dan sikap publik; dan ini juga berlaku untuk hubungan antara negara-bangsa”.

Diplomasi publik mencakup berbagai strategi yang disusun untuk memfasilitasi hasil yang lebih cepat. Bantuan luar negeri dan bantuan pembangunan sangat sesuai dalam lingkup diplomasi publik dan *soft power* karena berusaha untuk meningkatkan daya tarik sumber di benak khalayak sasaran domestik dan internasional, seperti propagasi positif di bawah ideologi yang berlaku (Alexander, 2014). Selain itu, dalam Potocki & Miłoszewska, (2010) juga menyebutkan bantuan pembangunan termasuk dalam bentuk pengungkapan *soft power*. Fenomena ini kemudian memunculkan istilah baru yakni diplomasi pembangunan (Zielińska, 2016). Diplomasi pembangunan dipahami sebagai bagian dari diplomasi publik karena kerap kali memiliki berbagai ciri khas *new public diplomacy*, seperti aktor pelaku tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga entitas non-negara, dan berbasis *soft power*.

Nye (2011) menuliskan tentang bantuan keuangan merupakan bentuk kekuatan ekonomi, sementara sumber daya ekonomi juga merupakan sumber dari *hard power* dan *soft power*. Selain bantuan keuangan, bantuan pembangunan juga dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti bantuan teknologi dan pengetahuan. Bantuan pembangunan erat kaitannya dengan *soft power* karena membentuk sikap positif, menimbulkan minat di negara donor, dan kerap kali didasari pada sumber daya non-materi yang ditawarkan oleh negara donor, seperti pengetahuan dan keahlian, pencapaian dan penemuan dalam sains, teknologi, lingkungan, kesehatan, sistem politik, kehidupan sosial, dan sebagainya (Zielińska, 2016). Maka dapat disimpulkan, semakin banyak bantuan yang diberikan dalam upaya membangun hubungan, semakin besar kemungkinan untuk meningkatkan *soft power* dan mendukung diplomasi publiknya. Dalam teori ini berfokus dan diaplikasikan pada penelitian ini untuk menjelaskan salah satu upaya negara kecil dalam mempertahankan hubungannya dengan negara-negara di kawasan yang sama adalah dengan melakukan pendekatan budaya, lebih berfokus pada masyarakat negara untuk menarik dan memikat.

1.5. Argumen Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis memiliki argumen bahwa kebijakan Pacific Reset yang ditujukan untuk merespon kehadiran Tiongkok terhadap hubungan Selandia Baru dengan Pasifik Selatan berimplikasi pada: (1) Peningkatan prioritas Selandia Baru pada Angkatan Pertahanan di Pasifik Selatan, (2) Peningkatan bantuan luar negeri Selandia Baru terhadap Pasifik Selatan dengan fokus memfasilitasi peningkatan pertumbuhan ekonomi, pembangunan, perdamaian dan keamanan kawasan, (3) Memperkuat *soft power* Selandia Baru dengan meningkatkan profil dan peran negara di Pasifik Selatan melalui berkolaborasi.

1.6. Metodologi Penelitian

1.6.1. Operasionalisasi Konsep

1.6.1.1. Peningkatan Angkatan Pertahanan di Pasifik Selatan

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, Angkatan Pertahanan difokuskan pada bagaimana Selandia Baru meningkatkan pertahanan dan keamanan di kawasan Pasifik Selatan. Pada 6 Juli 2018, Menteri Pertahanan Selandia Baru, Ron Mark merilis Laporan Kebijakan Pertahanan Strategis 2018, yang berisi pembaruan pengaturan kebijakan pertahanan strategis Selandia Baru yang mencerminkan kebijakan luar negeri Pemerintah Koalisi dan prioritas keamanan nasional. Dalam laporan tersebut memperkenalkan elemen-elemen baru pada pengaturan kebijakan Pertahanan Selandia Baru, termasuk seperangkat prinsip-prinsip kebijakan pertahanan yang baru dan kerangka kerja Komunitas, Bangsa dan Dunia untuk mencerminkan harapan pertahanan yang sudah lama ada dan prioritas-prioritas pemerintah ini.

Dalam mendukung pertahanan kawasan, kebijakan pertahanan strategis Selandia Baru adalah meningkatkan prioritas pada kemampuan Angkatan Pertahanan untuk beroperasi di Pasifik Selatan. Pemerintah Selandia Baru mengakui bahwa ini merupakan tanggung jawab Selandia Baru sebagai negara bagian dari Pasifik untuk berkontribusi dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan Pasifik, dan melihat tantangan yang dihadapi seperti dampak perubahan iklim maupun

meningkatnya ketidakstabilan eksternal di Pasifik (Laporan Kebijakan Pertahanan Strategis, 2018).

1.6.1.2. Meningkatkan Anggaran Luar Negeri Selandia Baru di Pasifik Selatan

Secara konseptual, bantuan luar negeri merupakan transfer modal, barang maupun jasa internasional dari suatu negara untuk kepentingan negara penerima atau penduduknya (Williams, 2021). Bentuk bantuan luar negeri yang kerap dilakukan adalah *official development assistance* (ODA), yakni bantuan yang diberikan guna memajukan pembangunan dan mengurangi kemiskinan. Umumnya, sumber utama ODA adalah berbentuk hibah bilateral antara satu negara ke negara lain walaupun beberapa bantuan berbentuk pinjaman (Williams, 2021). Dalam penelitian ini, bantuan luar negeri yang dimaksud adalah bantuan luar negeri yang diberikan oleh Selandia Baru ke Pasifik Selatan.

Dalam pidatonya mengenai kebijakan Pacific Reset pada tahun 2018, Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters menyebutkan bahwa kurangnya fokus Selandia Baru di Pasifik dalam sembilan tahun terakhir (McCulloch, 2018). Padahal, pada masa tersebut Pasifik menjadi ruang strategis yang lebih ramai dan diperebutkan. Atas dasar tersebut, Selandia Baru segera melakukan tindakan yakni dengan memperluas program bantuan pembangunan resmi untuk membantu negara-negara di Pasifik Selatan dalam meningkatkan ketahanan mereka, melalui otonomi mereka (Peters, 2018). Pemerintah Selandia Baru akan menambahkan dana bantuan luar negeri lebih dari \$714.22 juta selama empat tahun ke depan, terhitung dari tahun 2018 dalam pendanaan pembangunan luar negeri. Anggaran dana tersebut terutama akan dialokasikan untuk kawasan Pasifik sebagai respon terhadap pembangunan ekonomi dan keadaan darurat lainnya (McCulloch, 2018).

1.6.1.3. Memperkuat *Soft Power*

Kebijakan Pacific Reset disebutkan sebagai transisi hubungan antara Selandia Baru dengan Pasifik Selatan menjadi kolaborasi, yakni hubungan yang saling menguntungkan dari sebelumnya hubungan pendonor-penerima. Kementerian Luar Negeri Selandia Baru berusaha untuk memajukan kebijakan dengan lebih

terlibat dalam kegiatan di Pasifik, seperti halnya para pemimpin politik Selandia Baru melakukan kunjungan rutin ke Pasifik Selatan untuk menjalankan Misi Pasifik tahunan yang dipimpin oleh menteri luar negeri Selandia Baru (Mark, 2020). Selain itu, Selandia Baru juga menempatkan pos-pos diplomatik, sebagai upaya yang efektif dan efisien untuk menjangkau publik adalah melalui hibah di bawah Dana Kepala Misi yang diselenggarakan oleh masing-masing pos (Mark, 2020). Tiap pos diplomatik juga turut terlibat dalam kegiatan penjangkauan secara rutin.

Selain terlibat dalam kegiatan penjangkauan, sebagian besar pos diplomatik di Pasifik melakukan kegiatan kebudayaan. Kegiatan ini meliputi olahraga, pertukaran, lokakarya, konferensi, pertunjukan dan seni visual (termasuk kapa haka), sastra, film dan makanan (Mark, 2020). Rangkaian kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri Selandia Baru saat ini mencakup beasiswa melalui New Zealand Aid Programme (NZAP) (Mark, 2018). Anggaran Selandia Baru memberikan dorongan sebesar NZ\$3,2 miliar untuk pengeluaran kesehatan, tambahan NZ\$1,6 miliar untuk pendidikan dan NZ\$1 miliar untuk perumahan (Smyth, 2018).

1.6.2. Tipe Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan tipe penelitian eksplanatori sebagaimana pertanyaan dari penelitian ini berawalan dengan kata tanya ‘bagaimana’. Penelitian eksplanatori dilakukan untuk menjelaskan bagaimana fenomena terjadi dan untuk memprediksi kejadian di masa depan. Ini berfokus pada menganalisis situasi atau masalah tertentu untuk menjelaskan pola hubungan antar variabel sebab-akibat (Given, 2008). Maka dari itu, tugas dari penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dan membuktikan argumentasi. Dalam penelitian ini pula penulis akan menggunakan teori untuk mempermudah analisis, yang kemudian akan membantu dalam upaya memperoleh hasil akhir penelitian yang akurat.

1.6.3. Ruang Lingkup dan Jangkauan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah hubungan Tiongkok dengan Pasifik serta Selandia Baru terkait kebijakan Pacific Reset dan faktor-faktor yang mendorong Selandia Baru mengeluarkan kebijakan tersebut. Kemudian, jangkauan penelitian dimulai pada tahun 2018 ketika Selandia Baru mengeluarkan kebijakan Pacific Reset.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini didapatkan dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini berasal dari pidato baik dari pemerintah Selandia Baru, Tiongkok, dan negara-negara di Pasifik dan artikel resmi yang didapatkan melalui situs web resmi. Kemudian sumber sekunder dalam penelitian ini berasal dari artikel yang kredibel, buku, dokumen resmi pemerintah, laporan dan sumber internet lainnya termasuk media berita.

1.6.5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik analisis data *qualitative content analysis*. Teknik ini digunakan dengan menganalisis sejumlah data dan teori relevan dan kredibel terkait topik penelitian, kemudian data dan teori akan dikumpulkan melalui proses klasifikasi sistematis dengan mengidentifikasi pola sehingga mencapai kesimpulan (Schreier, 2012). Kesimpulan yang telah dicapai tersebut kemudian digunakan untuk membuktikan argumentasi penelitian penulis.

1.6.6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi pada lima bab. Pada bab pertama berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, argumentasi serta metodologi penelitian. Pada bab dua berisi mengenai hubungan Selandia Baru dengan Tiongkok sebelum munculnya kebijakan Pacific Reset. Pada bab tiga berisi mengenai hubungan Selandia Baru dengan Tiongkok setelah munculnya kebijakan Pacific Reset. Pada bab empat berisi mengenai implikasi kebijakan Pacific Reset terhadap hubungan Selandia Baru dengan Tiongkok. Terakhir, pada bab lima berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian.